

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS DANA DESA PADA KECAMATAN GAMPING

Yennisa<sup>1</sup>, Siti Wahyuningsih<sup>2</sup>, Dekeng Setyo Budiarto<sup>3</sup>  
yennisa.icha@upy.ac.id<sup>1</sup>, sitimoonk@gmail.com<sup>2</sup>, dekengsb@upy.ac.id<sup>3</sup>  
Universitas PGRI Yogyakarta

### ABSTRACT

*In recent years, Accountability is an important issue that is expressed in many studies. The purpose of this study was to examine the effect of government officials' competence, implementation of technology, government internal control systems, and government culture on the accountability of village funds. This research is a quantitative study by distributing questionnaires. The research respondents were 61 village apparatus in the Gamping sub-district. The results showed that government officials' competence, the implementation of technology, the government's internal control system, and the government's culture has a significant impact on the accountability of village fund management.*

**Keywords:** *competence of government officials, implementation of technology, government internal control system, government culture, village fund accountability*

### ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan permasalahan penting yang banyak di ungkapkan dalam penelitian saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi, sistem pengendalian intern pemerintah dan budaya pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner. Responden penelitian adalah 61 aparatur desa di kecamatan Gamping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi, sistem pengendalian intern pemerintah dan budaya pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Kata kunci:** kompetensi aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi, sistem pengendalian intern pemerintah, budaya pemerintah, akuntabilitas pengelolaan dana desa

### LATAR BELAKANG

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam kegiatan atau program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan publik. Akuntabilitas dan tata kelola desa yang terwujud akan meningkatkan kemandirian dan pembangunan sehingga tercipta pemberdayaan masyarakat yang baik (Achyani, 2019). Akuntabilitas publik memiliki keterkaitan dalam kinerja manajerial pada perangkat desa untuk pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas

akan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Wahyudi, Ngumar, & Suryono, 2018).

Akuntabilitas dapat digolongkan menjadi empat dimensi yaitu: akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan (Ellwood, 1993). Sebagai bagian dari pemerintahan, desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas dana desa. Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri No. 113/2014 Pasal 9 Ayat 2 tentang pendapatan desa. Dana desa yang dikucurkan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan berturut-turut dari tahun 2015-2019 yaitu sebesar 20,67 triliun, 46,

98 triliun, 60 triliun, dan 70 triliun (kemenkeu.go.id, 2019).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan memiliki arti yang penting, beberapa riset sebelumnya telah menguji beberapa variabel yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Beberapa variabel tersebut adalah kesesuaian standar akuntansi yang berlaku, kecukupan pengungkapan, kepatuhan pada peraturan, efektivitas sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen manajemen, otoritas pengambilan keputusan, budaya organisasi, serta kompetensi sumber daya manusia (Achyani, 2019; Mada, Kalangi, & Gamaliel, 2017; Trisaputra, 2013; Yudianto & Sugiarti, 2017).

Penelitian selanjutnya menjelaskan tentang peranan kompetensi aparatur (Dewi, Ramadhanti, & Wiratno, 2016; Ferina, Burhanuddin, & Lubis, 2016; Mada et al., 2017; Prastiti & Aziz, 2019), pemanfaatan teknologi informasi (Achyani, 2019; Nihayah, 2015; Prastiti & Aziz, 2019; Trisaputra, 2013; Wahyudi et al., 2018) dan sistem pengendalian intern (Prastiti & Aziz, 2019; Wardani & Andriyani, 2017; Yudianto & Sugiarti, 2017) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada modifikasi indikator yang membentuk kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan budaya pemerintahan. Indikator kompetensi aparatur desa pada penelitian ini mempertimbangkan ketentuan yang pada UU, 2014. Begitu pula indikator pemanfaatan teknologi informasi mempertimbangkan berlakunya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang salah satunya merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 247 (PMK, 2015). Pengembangan indikator yang membentuk SPIP merujuk pula pada salah satu informasi yang tertuang di Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 sebagai dasar pengembangannya. Selanjutnya, pengembangan indikator yang membentuk budaya pemerintahan merujuk pada Peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2008.

Penelitian ini masih menarik karena: 1) kecamatan Gamping memiliki arti penting dalam berdirinya sejarah Keraton Yogyakarta dan merupakan bagian pengembangan wilayah kota Yogyakarta ke arah barat. Kabupaten Sleman memiliki pertumbuhan ekonomi dan sosial yang pesat serta migrasi penduduk yang tinggi (BAPPEDA, 2011; Perda, 2009, 2019); 2) melengkapi penelitian yang dilakukan Prastiti & Aziz (2019) dengan menambah budaya pemerintahan sebagai variabel independen karena dapat mempengaruhi akuntabilitas pada sektor publik (Gde et al., 2018); 3) kualitas laporan keuangan atau akuntabilitas akan meningkat apabila aparatur pemerintahan melaksanakan tanggung jawab (Prastiti & Aziz, 2019); 4) kinerja pemerintahan akan berhasil apabila suatu organisasi menerapkan budaya pemerintahan dengan kuat (Gde et al., 2018); 5) adanya inkonsistensi riset yang menyatakan bahwa implementasi IT memiliki dampak pada kualitas laporan keuangan pemda (Achyani, 2019; Nihayah, 2015; Prastiti & Aziz, 2019; Trisaputra, 2013; Wahyudi et al., 2018), sedangkan menurut (Diani, 2014; Wardani & Andriyani, 2017) pemanfaatan IT tidak berdampak pada keandalan laporan keuangan pemerintahan desa; 6) inkonsistensi penelitian yang menemukan dampak kompetensi pada akuntabilitas kinerja pemda (Ferina et al., 2016; Mada et al., 2017; Prastiti & Aziz, 2019; Pratiwi & Ulfah, 2017; Wardani & Andriyani, 2017) sedangkan menurut (Raharjo, Sjamsuddin, & Hardjanto, 2013) partisipasi tidak berdampak pada akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah.

## KAJIAN TEORI

### Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pihak pemilik perusahaan sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu pihak pemilik perusahaan sebagai *principal* dengan pengelola perusahaan atau manajemen sebagai *agent*. Pihak *principal* merupakan pihak yang memberi wewenang

dalam mengelola perusahaan kepada pihak *agent*. Hubungan keterkaitan akuntabilitas dan teori agensi diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan (Kholmi, 2010). *Agency theory* menggambarkan prinsip keagenan antar eksekutif dengan komando ke atas dan ke bawah (vertikal) (Pratiwi & Ulfah, 2017). Selanjutnya riset ini akan menghubungkan prinsip keagenan antara masyarakat dengan pemerintah desa, dimana masyarakat merupakan *principal* dan pemerintah desa merupakan agen. Teori *agency* menjelaskan bahwa dalam perspektif ini agen akan memiliki informasi lebih banyak dibandingkan *principal* sehingga kemungkinan akan terdapat informasi yang disembunyikan (informasi asimetri). Pemerintah desa sebagai agen dipercaya oleh masyarakat untuk menjalankan fungsinya melayani masyarakat (Pratiwi & Ulfah, 2017).

### Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban kinerja atas aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap pihak lain (Kholmi, 2010). Akuntabilitas mengacu pada hubungan dimana *principal* memiliki kemampuan untuk memperoleh jawaban dari agen atau pertanyaan tentang perilaku yang diusulkan dan *principal* dapat memberi sanksi jika tindakan atau jawaban agen tidak memuaskan (Kholmi, 2010). Pemerintah berkewajiban menyajikan informasi (akuntabilitas) terhadap para pengguna sehingga dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (Yudianto & Sugiarti, 2017). Prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan melaksanakan atas serangkaian program yang berada di bawahnya untuk meningkatkan kepercayaan publik (Prastiti & Aziz, 2019).

### Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD. Dana desa dapat digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014). Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap dan setiap

desa dihitung serta dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang dikelola dalam masa satu tahun yakni mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014).

Dana desa merupakan sumber dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam mengoptimalkan potensi alam, manusia, dan ekonominya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Rini & Utomo, 2019).

Pengalokasian dana desa termasuk salah satu bentuk desentralisasi pemerintah lokal dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (Riswanto, Ningsih, & Daryati, 2017). Pengelolaan dana desa diharapkan dapat berjalan secara efektif dalam pembangunan agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa (Triani & Handayani, 2018).

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kompetensi aparatur desa merupakan keterlibatan sumber daya manusia dalam mengelola dana desa dengan peningkatan kualitas melalui pembinaan (Ferina et al., 2016). Perangkat desa yang mempunyai latar pendidikan akuntansi dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dengan tepat dan baik melalui pelatihan-pelatihan (Wardani & Andriyani, 2017). Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Mada et al., 2017). Tanggung jawab dan akuntabilitas aparatur desa wajib melaporkan kegiatan atau program kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Prastiti & Aziz, 2019). Oleh karena itu, sistem keuangan pada desa dapat meningkatkan akuntabilitas sehingga penyajian laporan pengeluaran dapat berjalan dengan baik (Pratiwi & Ulfah, 2017). Berdasarkan temuan riset di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa.

Teknologi informasi merupakan jaringan sistem yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, dan menyimpan data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dalam pelayanan publik (Nihayah, 2015). Pemanfaatan teknologi informasi yang baik dalam pengelolaan keuangan mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap masyarakat desa agar tercipta keakuratan dan ketepatan informasi (Achyani, 2019). Teknologi informasi dapat mendorong kecepatan informasi secara andal serta meringankan pemerintah pusat dalam hal pengawasan (Prastiti & Aziz, 2019). Penggunaan aplikasi keuangan dapat meningkatkan kinerja aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan (Wahyudi *et al.*, 2018). Berbeda dengan temuan tersebut, Diani (2014); Wardani & Andriyani (2017) membuktikan bahwa pemanfaatan IT tidak memiliki dampak langsung pada keandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa. Menurut hasil penelitian Trisaputra (2013), teknologi informasi yang handal akan mempercepat pelaporan dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga berpengaruh terhadap akuntabilitas. Ekspektasi ini dapat dinyatakan dengan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem pengendalian intern yang diimplementasikan pada semua unsur di lingkungan pemerintah pusat dan daerah serta memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (Prastiti & Aziz, 2019). Sistem pengendalian intern berkaitan dengan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan (Achyani, 2019). Keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern sehingga dapat mencegah atau mendeteksi adanya penggelapan (Wardani & Andriyani, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yudianto & Sugiarti, 2017) membuktikan

bahwa SPIP mempunyai peran yang signifikan untuk memastikan bahwa akuntabilitas keuangan berjalan dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa. Rangkaian tersebut menjadi dasar hipotesis ketiga pada penelitian ini, yaitu:

H<sub>3</sub>: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa.

Budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai yang dikembangkan oleh organisasi yang terbentuk menjadi aturan sebagai pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan serta meningkatkan kerja sama kelompok (Megantara, Suliyanto, & Purnomo, 2019). Selain itu, budaya organisasi atau budaya pemerintahan merupakan ciri khusus yang membedakan sehingga memiliki arti bagi kehidupan pada perusahaan atau pemerintahan untuk memecahkan suatu persoalan (Ferina *et al.*, 2016). Budaya organisasi mengikat karyawan yang bekerja di dalamnya untuk berperilaku sesuai norma yang ada, sehingga berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah (Gde *et al.*, 2018). Berdasarkan beberapa temuan riset di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Budaya pemerintahan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa.

## METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintahan desa di lima kelurahan yaitu desa Ambarketawang, desa Nogotirto, desa Balecatur, desa Trihanggo, dan desa Banyuraden, Kecamatan Gamping yang mendapatkan dana desa pada tahun 2019. Lima kelurahan di Kecamatan Gamping memiliki 59 dusun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria memilih aparatur desa yang mengetahui proses pengelolaan keuangan desa dan terlibat dalam administrasi dana desa minimal satu tahun. Aparatur desa itu antara lain kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan dan dukuh. Peneliti menyebar 90 kuesioner, sementara kuesioner yang kembali dan dapat digunakan dalam pengolahan adalah 61 kuesioner, serta sisanya sebanyak 4 kuesioner

tidak dapat diolah dan 25 kuesioner tidak kembali. Periode penyebaran kuesioner ke aparat desa dilaksanakan pada tanggal 5 November sampai dengan 30 Desember 2019.

Kompetensi aparat desa diukur dengan merujuk pada angket yang dikembangkan oleh Masruhin & Kaukab (2019) dan UU (2014). Variabel ini menggunakan indikator dengan 7 pertanyaan tentang tanggung jawab, pelatihan, dan pengalaman. Selanjutnya, peneliti menggunakan skala yang digunakan Masruhin & Kaukab (2019). Pengukuran variabel digambarkan dalam skala likert dengan lima angka penilaian yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

Pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan angket dari Nihayah (2015) dan Peraturan Menteri Keuangan No.247 Tahun 2015 dengan 7 pertanyaan. Variabel ini mengukur perihal *hardware*, yaitu perangkat komputer dan jaringan internet dengan 8 pertanyaan. Selanjutnya sistem pengendalian intern pemerintah dirujuk pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 pasal 3 ayat 1 dengan 8 pertanyaan. Indikator yang digunakan dalam variabel ini meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Budaya pemerintahan diukur dengan merujuk pada Peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2008 dengan 8 pertanyaan dan menggunakan indikator perihal rela melayani, ahli profesional, selaras, akal budi luhur-jati diri, teladan, inovasi, dan yakin. Sementara, akuntabilitas dana desa diukur menggunakan 6 pertanyaan yang merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 71 (PP, 2010), yang mengambil penjelasan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya mengenai tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan

yang meliputi relevan, dapat dibandingkan, andal, dan mudah dipahami. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan regresi linier untuk menjelaskan dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan pengumpulan data selama kurang lebih 2 bulan dengan menggunakan bantuan kuesioner dan hasil lengkap deskripsi responden ditunjukkan pada Tabel 1. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh instrumen adalah valid karena memiliki  $p\text{ value} < 0,05$ . Tabel 2 menunjukkan hasil uji validitas variabel kompetensi aparat desa dan Tabel 3 menunjukkan reliabilitas seluruh variabel penelitian. Validitas variabel diukur dengan menggunakan *pearson's correlation*, sedangkan instrumen reliabilitas menggunakan *cronbach's α*.

Tabel 1. Karakteristik Responden

| Karakteristik        |                 | Jumlah    |
|----------------------|-----------------|-----------|
| Jenis Kelamin        | Laki-laki       | 54        |
|                      | Perempuan       | 7         |
|                      | <b>Total</b>    | <b>61</b> |
| Pendidikan Terakhir  | SMP             | 3         |
|                      | SMA             | 36        |
|                      | D1              | 1         |
|                      | D3              | 4         |
|                      | S1              | 20        |
|                      | <b>Total</b>    | <b>61</b> |
| Jabatan              | Kepala Desa     | 5         |
|                      | Sekretaris Desa | 5         |
|                      | Kepala Urusan   | 12        |
|                      | Dukuh           | 39        |
|                      | <b>Total</b>    | <b>61</b> |
| Usia                 | < 20 tahun      | 0         |
|                      | 20-35 tahun     | 6         |
|                      | 36-50 tahun     | 30        |
|                      | > 50 tahun      | 25        |
|                      | <b>Total</b>    | <b>61</b> |
| Lama Bekerja di Desa | < 1 tahun       | 0         |
|                      | 1-5 tahun       | 15        |
|                      | 6-10 tahun      | 11        |
|                      | > 10 tahun      | 35        |
|                      | <b>Total</b>    | <b>61</b> |

Tabel 2. Uji Variabel Kompetensi Aparatur Desa

|       | (1)     | (2)     | (3)     | (4)     | (5)     | (6)     | (7)     | Total |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| N.1   | 1       |         |         |         |         |         |         |       |
| N.2   | 0,283*  | 1       |         |         |         |         |         |       |
| N.3   | 0,142   | 0,472** | 1       |         |         |         |         |       |
| N.4   | 0,314*  | 0,330** | 0,293*  | 1       |         |         |         |       |
| N.5   | 0,229   | 0,483** | 0,452** | 0,278*  | 1       |         |         |       |
| N.6   | 0,399** | 0,449** | 0,402** | 0,401** | 0,433** | 1       |         |       |
| N.7   | 0,276*  | 0,447** | 0,326** | 0,336** | 0,339** | 0,512** | 1       |       |
| Total | 0,571** | 0,772** | 0,658** | 0,614** | 0,690** | 0,772** | 0,680** | 1     |

Keterangan: \* Sig < 5%, \*\*Sig < 1%

Tabel 3. Uji Reliabilitas Variabel

| Variabel                                     | Cronbach's alpha |
|----------------------------------------------|------------------|
| Kompetensi Aparatur Desa (KAD)               | 0,796            |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)        | 0,856            |
| Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 0,811            |
| Budaya Pemerintahan (BP)                     | 0,836            |
| Akuntabilitas Dana Desa (ADD)                | 0,743            |

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

| Variabel                        | $\beta$ | P Value | Hasil                     |
|---------------------------------|---------|---------|---------------------------|
| Kompetensi Aparatur desa        | 0,151   | 0,034*  | H <sub>1</sub> : didukung |
| Pemanfaatan Teknologi Informasi | 0,228   | 0,003*  | H <sub>2</sub> : didukung |
| SPIP                            | 0,188   | 0,020*  | H <sub>3</sub> : didukung |
| Budaya Pemerintahan             | 0,212   | 0,005*  | H <sub>4</sub> : didukung |
| F Hitung = 62,974               |         | 0,000** |                           |
| Adjusted R Square = 0,805       |         |         |                           |

Keterangan: \* Sig < 5%, \*\* sig < 1%

Berbeda dengan temuan Raharjo *et al.* (2013), penelitian ini secara statistik dapat membuktikan bahwa kompetensi memiliki dampak yang signifikan pada pelaporan dan akuntabilitas dana desa. Keahlian aparatur desa membutuhkan pelatihan-pelatihan melalui pembinaan untuk mendukung tugas atau kinerja pemerintahan desa (Ferina *et al.*, 2016). Aparatur desa yang mempunyai latar pendidikan akuntansi dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas dana desa (Mada *et al.*, 2017; Wardani & Andriyani, 2017). Dengan demikian tanggung jawab dan akuntabilitas perangkat desa wajib melaporkan kegiatan atau program terhadap publik (Prastiti & Aziz, 2019). Kemampuan dan pengetahuan saling berkaitan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam mengelola dana desa sehingga harus dimiliki oleh aparatur desa (Masruhin & Kaukab, 2019).

Penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Diani (2014); Wardani & Andriyani (2017) bahwa implementasi sistem informasi memiliki dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan responden yang sebagian besar SMA dan secara administratif sudah didukung dengan jaringan internet. Pemanfaatan teknologi yang baik akan mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap masyarakat desa agar tercipta keakuratan dan ketepatan informasi (Achyani, 2019; Prastiti & Aziz, 2019). Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka kinerja pemerintahan desa juga akan semakin meningkat (Nihayah,

2015; Trisaputra, 2013). Selanjutnya kemauan untuk belajar pengetahuan tentang aplikasi Siskeudes akan berpengaruh terhadap kinerja manajerial perangkat desa (Wahyudi *et al.*, 2018).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan dapat ditingkatkan jika Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilakukan dengan baik (Achyani, 2019) sehingga ini dapat meminimalisir penggelapan di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah (Prastiti & Aziz, 2019). Pengendalian internal memiliki peran sangat penting karena dapat digunakan untuk mengawasi dan mengukur penggunaan sumberdaya pada pemerintahan. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh SPIP (Wardani & Andriyani, 2017). Oleh karena itu tingkat pemahaman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh aparatur desa untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan pengendalian dalam kegiatan pemerintahan.

Penelitian ini secara statistik dapat membuktikan bahwa budaya pemerintahan memiliki dampak yang signifikan pada akuntabilitas dana desa. Sejalan dengan temuan Megantara *et al.* (2019) bahwa aparatur desa mempunyai pemahaman budaya yang baik untuk menerapkan dalam kinerja pemerintahan maupun kehidupan pribadinya. Budaya yang kuat akan mempengaruhi hasil kinerja tinggi karena berperilaku yang sesuai dalam bekerja akan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah (Gde *et al.*, 2018).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa data menunjukkan terdapat pengaruh positif signifikan antara kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan budaya pemerintahan terhadap akuntabilitas dana desa. Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu: menggunakan responden dalam lingkup se-kecamatan Gamping. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas wilayah misalnya lingkup se-Kabupaten dan

melengkapi dengan metode lain. Riset yang akan datang dapat menggunakan beberapa dimensi yang berkaitan dengan akuntabilitas seperti regulasi, komitmen organisasi pemerintahan serta partisipasi aparatur pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, F. (2019). The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in the Villages in Wonogiri District). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, (Vol 4, No 2 (2019)), 118–135. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i2.8521>
- BAPPEDA. (2011). Gambaran Umum Kondisi Daerah [Regional General Description]. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [The Medium-Term Regional Development Plan]*, 1–39. Retrieved from [http://www.slemankab.go.id/wp-content/file/rpjmd2011/BAB\\_II\\_GambaranUmumKondisiDaerah\\_a.pdf](http://www.slemankab.go.id/wp-content/file/rpjmd2011/BAB_II_GambaranUmumKondisiDaerah_a.pdf)
- Dewi, R. A., Ramadhanti, W., & Wiratno, A. (2016). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3(4), 311–327.
- Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi*, 1–23.
- Elwood, Sheila. 1993. Parish and Town Councils: Financial Accountability and Management. *Local Government Studies*, Volume 19: 368–386.
- Ferina, I. S., Burhanuddin, & Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 14(3), 321–336. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v14i3.3991>
- Gde, I. W., Darma, Y., Bagus, I., Astika, P., Rm, M., & Bambang, H. (2018). The Effect of Internal Control System, Tri Hita Karana Culture and Good Governance on Government Performance. *IJSBAR*, 4531, 26–37.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kholmi, M. (2010). Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi. *Ekonomika Bisnis*, 02(02), hal. 357–370.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Megantara, I., Suliyanto, & Purnomo, R. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi dan Rotasi Pekerjaan terhadap Motivasi Kerja Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 21(1).
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Nihayah, A. (2015). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Internal terhadap Ketepatanwaktuan dan Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *International Journal of Soil Science*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.3923/ijss.2017.32.38>

- Perda. (2009). Laporan Akuntabilitas Kabupaten Sleman, 1–15. Retrieved from <http://www.slemankab.go.id/1011/laporan-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-tahun-2009.slm>
- Perda. (2019). Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Pembangunan Menengah Daerah dan Masyarakat Desa Tahun 2016–2021, 23(3), 6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1477753>
- Pergub. (2008). Peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2008 Pedoman Budaya Pemerintahan.
- PMK. (2015). Peraturan Menteri No. 247 Tahun 2015.
- PP. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- PP. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Prastiti, S. D., & Aziz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Pratiwi, U., & Ulfah, P. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 429–440. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Raharjo, T., Sjamsuddin, S., & Hardjanto, I. (2013). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Tahun 2011 Di Desa Jembul Dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Implementation of Village Fund Allocation Policy 2011 in Sumengko & Jembul Village Jatirejo District , Mojokerto, 16(1), 32–40.
- Rini, B. P. M., & Utomo, R. B. (2019). Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Dana Desa Tahun 2018 di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul). *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 132–143.
- Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1169–1176. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136–155. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>
- Trisaputra, A. (2013). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Fekon*, 5(1), 11–21. Retrieved from <http://scholar.google.com>
- UU. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, (1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Wahyudi, A., Ngumar, S., & Suryono, B. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perangkat Desa Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa. *Proceedings*, 1(1), 360–371. <https://doi.org/10.26460/AD.V3I2.4980>
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270>
- Yudianto, I., & Sugiarti, E. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 1–18.